



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DPMPTSP KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh DPMPTSP Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, dokumen ini juga diselaraskan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024, yang lebih lanjut menekankan pentingnya pemutakhiran data dan penyelarasan klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan terukur serta menjadi panduan operasional bagi seluruh perangkat DPMPTSP Kota Bekasi dalam upaya mencapai visi, misi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya dokumen ini, kami berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dapat berjalan dengan lebih terarah dan sinergis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan tenaga dan pemikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 ini.

Bekasi, 15 Agustus 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi



Dr. Dicky Irawan, S.T M.T
Pembina Utama Muda
IV/c NIP. 19720413
199901 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL : III

B A B I 1

P E N D A H U L U A N 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

B A B II 11

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU 11

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DPMPTSP KOTA BEKASI..... 11

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KOTA BEKASI..... 44

2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 47

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 69

BAB III 70

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 70

KOTA BEKASI 70

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 70

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KOTA BEKASI 71

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 72

BAB IV..... 91

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BEKASI 91

B A B V PENUTUP 98

Daftar Tabel :

2.1	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	12
2.2	Capaian kinerja DPMPTSP Tahun Anggaran 2024	22
2.3	Capaian kinerja Program DPMPTSP Tahun Anggaran 2024	24
2.4	Pencapaian indikator kinerja utama nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Tahun 2024	31
2.5	Pencapaian indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	36
2.6	Pencapaian indikator kinerja utama Peningkatan Nilai Investasi Daerah Tahun 2024	38
2.7	Rekapitulasi Target dan Sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020 s.d. Tahun 2024	42
2.8	Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020-2024	43
2.9	Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026	44
2.10	Review terhadap rancangan awal RKPD 2026	50
2.11	Sandingan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.....	69
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	74
3.2	Program Nasional, program Kota dan Kegiatan	78
3.3	Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 (rancangan awal) DPMPTSP Kota Bekasi	79
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif	94

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi adalah dokumen penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan per tahun.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Dokumen Renja DPMPTSP yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Bekasi juga mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan disusun berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode 2025 s.d 2029 yang telah dituangkan dalam Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

renja DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Bekasi dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun Visi dan Misi Kota Bekasi sebagai berikut :

a Visi : **Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera**

b. Misi :

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan masuk ke dalam misi 4 tentang **Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat** dimana DPMPTSP akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Wali Kota terpilih proses penyusunan prioritas kebijakan, program, serta indikator kinerja yang selaras dengan lima pilar misi guna mewujudkan Kota Bekasi yang semakin nyaman, sejahtera, dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nternasional.

Dokumen Perencanaan Kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) yang selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Bekasi. Selain itu, dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 juga mengacu kepada Rencana Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkaitan langsung dengan urusan penanaman modal.

Renja DPMPTSP Kota Bekasi disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja

Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pebetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat: 110/2014);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor xx);
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E);
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66 Seri E);
34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E);
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
36. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
37. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);

38. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11);
39. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
40. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
41. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor 068.2/Kep.71/DPMPTSP.Set/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor :068.2/Kep.719 DPMPTSP/VII/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
42. Surat Edaran Nomor 000.7/8915/Bappelitbangda.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dalam urusan penanaman modal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi adalah :

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026 dalam mewujudkan arah capaian kinerja berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi Tahapan APBD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak mengubah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku;
2. Menyusun rencana strategi pencapaian indikator kinerja pembangunan DPMPTSP Kota Bekasi selama tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi dan Tahunan Daerah;
3. Mengevaluasi Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun sebelumnya dan evaluasi

hasil Renja tahun berjalan;

4. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026;
5. Tersedianya acuan untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja pada DPMPTSP Tahun 2026;
6. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika Penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APDB tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bekasi

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN DPMPTSP KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

Menjelaskan perumusan kegiatan prioritas tahun 2026, dan rencana pendanaan berdasarkan pagu indikatif.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

B A B II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Bekasi

Renja suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan. Dalam dokumen , tertuang tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bekasi merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja tahun berjalan. Kepala DPMPTSP Kota Bekasi menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappelitbangda ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala DPMPTSP Kota Bekasi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Memasuki Tahun ketiga pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 Tahun pertama pada renstra Tahun 2024-2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja DPMPTSP Kota Bekasi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah. Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024 TRIWULAN IV DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																												
Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
					5			6		7		8		9					10				11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%	
					1	2	3	4	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100 %	34.377.638.760,00	14,56	4.661.984.899,00	23,18	9.322.429.072,00	35,31	6.931.257.314,00	26,14	10.104.279.025,00	99,20	31.219.950.310,00	99,20	90,81	99,20	31.219.950.310,00						
2.18		Penanaman Modal					100 %	34.377.638.760,00	14,56	4.661.984.899,00	23,18	9.322.429.072,00	35,31	6.931.257.314,00	26,14	10.104.279.025,00	99,20	31.219.950.310,00	99,20	90,81	99,20	31.219.950.310,00						
2.18.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	2.879.950.000.000,00	99,02 %	23.569.263.267,00	100,00 %	27.969.175.280,00	11,57	3.972.197.712,00	17,60	6.156.219.415,00	40,29	5.710.429.620,00	29,43	7.681.007.842,00	98,91	25.521.854.589,00	98,91	91,25	98,91	25.521.854.589,00	98,91	0,89			
2.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	7.000.000,00	40,00	0,00	20,00	1.116.300,00	0,00	4.293.000,00	40,00	974.700,00	100,00	6.384.000,00	100,00	91,20	100,00	6.384.000,00	100,00	0,00				
2.2.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Wilayah Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Wilayah Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Wilayah Realisasi Kinerja SKPD				5,00 Laporan	7.000.000,00	2,00	0,00	1,00	1.116.300,00	0,00	4.293.000,00	2,00	974.700,00	3,00	6.384.000,00	100,00	91,20	5,00	6.384.000,00	5,00	0,00				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																	100,00	91,20	100,00	6.384.000,00	100,00	0,00						
Predikat kinerja Kegiatan																	Sangat Tinggi											
			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %			100,00 %																					
2.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100 %	15.246.446.000,00	8,93	2.293.030.685,00	17,62	4.922.829.542,00	35,54	2.926.766.745,00	37,63	3.449.984.086,00	99,12	13.592.611.038,00	99,12	89,15	99,12	13.592.611.038,00	99,12	0,47				
2.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1.708,00 Orang/Bulan	15.239.446.000,00	305,00	2.293.030.685,00	602,00	4.922.060.542,00	360,00	2.924.462.745,00	411,00	3.446.262.086,00	1.678,00	13.585.736.038,00	98,24	89,15	1.678,00	13.585.736.038,00	1.678,00	0,00				
2.2.02.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4,00 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	2,00	2.304.000,00	2,00	3.722.000,00	4,00	6.835.000,00	100,00	97,93	4,00	6.835.000,00	4,00	0,00				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																	99,12	89,15	99,12	13.592.611.038,00	99,12	0,47						
Predikat kinerja Kegiatan																	Sangat Tinggi											

RENJA TAHUN 2026

[illegible]

Document Generated From MONEV - Monitoring dan Evaluasi Pada January 02 2025, 09:04:37

Halaman 1 dari 7

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Pelaksana Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Prediksi Kinerja Kegiatan																			Sangat Tinggi								
1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					100 %	2.144.031.000,00	13,10	59.463.400,00	22,62	646.691.167,00	41,67	235.624.125,00	22,62	121.861.586,00	100,00	1.083.642.678,00	100,00	94,72	100,00	1.083.642.678,00	100,00	8,04		
1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1,00 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.684.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8.684.000,00	100,00	86,84	1,00	8.684.000,00	1,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1,00 Paket	424.031.000,00	0,00	43.155.000,00	0,00	302.776.900,00	0,00	16.921.400,00	1,00	42.451.700,00	1,00	405.305.000,00	100,00	95,58	1,00	405.305.000,00	1,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.06.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1,00 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.699.740,00	1,00	149.949.460,00	0,00	7.352.800,00	1,00	185.002.000,00	100,00	92,50	1,00	185.002.000,00	1,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.06.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12,00 Dokumen	20.000.000,00	3,00	1.600.000,00	3,00	5.900.000,00	3,00	6.000.000,00	3,00	4.500.000,00	12,00	18.000.000,00	100,00	90,00	12,00	18.000.000,00	12,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.06.8		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12,00 Laporan	50.000.000,00	3,00	0,00	6,00	13.194.250,00	0,00	20.916.000,00	3,00	12.893.500,00	12,00	47.003.750,00	100,00	94,01	12,00	47.003.750,00	12,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

RENJA TAHUN 2026

1.2.06.9		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD				12,00 Laporan	438.000.000,00	3,00	14.710.400,00	6,00	208.436.277,00	2,00	53.087.265,00	1,00	54.663.986,00	12,00	410.897.926,00	100,00	95,56	12,00	410.897.926,00	12,00	0,00	Dinas Perencanaan Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.2.06.10		Penatausahaan Arup Dinamis pada SAPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arup Dinamis pada SAPD				12,00 Dokumen	10.000.000,00	2,00	0,00	4,00	0,00	6,00	8.750.000,00	0,00	0,00	12,00	8.750.000,00	100,00	87,50	12,00	8.750.000,00	12,00	0,00	Dinas Perencanaan Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			100,00	94,72	100,00	1.089.642.678,00	100,00	0,04		
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Tinggi							
1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100 %	998.989.000,00	14,29	57.950.000,00	4,76	0,00	14,29	105.100.000,00	57,14	784.850.000,00	90,48	947.100.000,00	90,48	95,60	90,48	947.100.000,00	90,48	0,09		
1.2.07.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21,00 Unit	324.969.000,00	6,00	57.950.000,00	2,00	0,00	6,00	105.100.000,00	3,00	120.100.000,00	17,00	302.150.000,00	80,93	92,98	17,00	302.150.000,00	17,00	0,00	Dinas Perencanaan Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hanya terakumulasi sejumlah 17 unit peralatan dan mesin lainnya, dikarenakan ada 4 unit barang yang tidak memenuhi nilai TACIL.
1.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				48,00 Unit	644.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	644.950.000,00	48,00	644.950.000,00	100,00	95,97	48,00	644.950.000,00	48,00	0,00	Dinas Perencanaan Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			90,48	95,60	90,48	947.100.000,00	90,48	0,03		
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Tinggi							
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %			100,00 %																			
1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	9.821.729.260,00	20,83	1.549.872.722,00	25,00	2.575.780.759,00	25,00	2.263.721.646,00	29,17	2.986.101.654,00	100,00	9.355.456.761,00	100,00	94,20	100,00	9.355.456.761,00	100,00	0,32		
1.2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12,00 Laporan	640.000.000,00	3,00	105.256.523,00	3,00	98.399.080,00	3,00	110.944.024,00	3,00	117.619.713,00	12,00	432.221.342,00	100,00	87,33	12,00	432.221.342,00	12,00	0,00	Dinas Perencanaan Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

RENJA TAHUN 2026

																Rata-rata capaian kinerja Program (%)				100,00	82,38	100,00	374.232.000,00	100,00	37,37		
																Predikat kinerja Program				Sangat Tinggi							
2.18.4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemertan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100,00 %	6.430.000.000,00	100,00 %	6.430.223.179,00	100,00 %	6.433.032.300,00	32,02	330.384.187,00	15,38	972.994.637,00	9,90	939.797.194,00	18,00	1.817.848.427,00	100,00	4.101.044.485,00	100,00	88,14	100,00	4.101.044.485,00	100,00	43,19		

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemertitan Perizinan sesuai SOP					200 %	4.853.032.300,00	32,02	330.384.187,00	15,38	972.994.637,00	9,90	939.797.194,00	18,00	1.817.848.427,00	100,00	4.101.044.485,00	100,00	88,14	100,00	4.101.044.485,00	100,00	83,19		
4.2.01.6		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Petaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					11.000,00 Petaku Usaha	4.933.032.300,00	8.805,00	330.384.187,00	2.195,00	936.614.637,00	0,00	901.307.194,00	0,00	1.388.687.427,00	11.000,00	4.005.173.485,00	100,00	87,97	11.000,00	4.005.173.485,00	11.000,00	8,03	Divisi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4.2.01.8		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Linfas Daerah Kabupaten/Kota tiap Kegiatan Usaha Dari Petaku Usaha					500,00 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	120,00	0,00	94,00	16.250.000,00	98,00	48.400.000,00	100,00	31.181.999,00	500,00	95.871.000,00	100,00	95,87	500,00	95.871.000,00	500,00	8,01	Divisi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																		100,00	88,14	100,00	4.101.044.485,00	100,00	83,19				
Predikat kinerja Kegiatan																		Sangat Tinggi									
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																		100,00	88,14	100,00	4.101.044.485,00	100,00	83,19				
Predikat kinerja Program																		Sangat Tinggi									

2.18.3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Adm Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan jumlah Perusahaan PHGD/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	26,00 %	780.000.000,00	66,67 %	627.123.500,00	26,00 %	690.178.000,00	9,96	42.400.000,00	43,99	265.340.000,00	36,03	122.793.300,00	8,03	284.378.300,00	100,00	654.914.000,00	26,00	94,89	100,00	654.914.000,00	100,00	83,96		
5.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah Perusahaan PHGD/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM				100 %	690.178.000,00	9,96	42.400.000,00	43,99	265.340.000,00	36,03	122.793.300,00	8,03	284.378.300,00	100,00	654.914.000,00	100,00	94,89	100,00	654.914.000,00	100,00	83,96			
5.2.01.4		Penyelesaian Pemenuhan dan Hambatan yang dihadapi Petaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Pemenuhan dan Hambatan yang dihadapi Petaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya				10,00 Kegiatan Usaha	62.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	61.396.000,00	0,00	0,00	10,00	61.396.000,00	100,00	96,59	10,00	61.396.000,00	10,00	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
5.2.01.5		Bimbingan Teknis kepada Petaku Usaha	Jumlah Petaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300,00 Petaku Usaha	228.349.000,00	0,00	0,00	300,00	180.740.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	18.707.000,00	300,00	218.447.000,00	100,00	95,66	300,00	218.447.000,00	300,00	0,28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
5.2.01.6		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Petaku Usaha yang Telah Diwarnai dan Diupdate Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Petaku Diakukan Inspeksi Lapangan ; serta Diakukan Evaluasi Penilaian Kegiatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				519,00 Kegiatan Usaha	399.553.000,00	155,00	42.400.000,00	197,00	24.600.000,00	42,00	42.399.500,00	125,00	265.071.500,00	519,00	375.071.000,00	100,00	93,87	519,00	375.071.000,00	519,00	0,48	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																			100,00	94,89	100,00	654.914.000,00	100,00	83,96			
Predikat kinerja Kegiatan																			Sangat Tinggi								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			100,00	94,89	100,00	654.914.000,00	100,00	83,96			
Predikat kinerja Program																			Sangat Tinggi								
2.18.8	Meningkatnya Akuntabilitas dan Professionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	100,00 %	1.320.000.000,00	23,00 %	906.177.188,00	100,00 %	610.933.000,00	23,00	96.803.000,00	23,00	83.963.000,00	23,00	138.323.000,00	23,00	246.832.236,00	100,00	567.923.236,00	100,00	92,96	100,00	567.923.236,00	100,00	43,82		

Dari Tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 31.219.950.310 atau 99,20% dari seluruh anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp.34.377.658.760,- dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 91,25% atau Rp 25.521.854.589 dari total program pagu sebesar Rp 27.969.175.260 sedangkan realisasi fisiknya mencapai 100%, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :
 - a. Tersedianya dokumen dokumen Renstra 2024-2026, dokumen perubahan Renja Tahun 2024, dokumen renja awal dan tahun 2025, dokumen evaluasi triwulan I,II III dan IV dokumen SAKIP yang didukung oleh data-data dari masing-masing bidang sesuai tupoksi dan penyerapan anggaran sesuai alokasi yang sudah ditentukan.
 - b. Adanya perpindahan pegawai ASN akan mengakibatkan penyerapan anggaran tidak sesuai target awal melainkan berdasarkan kondisi eksisting yang ada;
 - c. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai rencana alokasi dan spesifikasi yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan alokasi anggaran. Kendala dalam pelaksanaannya yaitu peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan saat ini diprioritaskan kepada aparatur ASN, belum dapat mengakomodir Non ASN;
 - e. Pengadaan barang sesuai rincian sebagaimana tertuang dalam rencana anggaran;
 - f. Pengadaan barang/ jasa sesuai jadwal dan alokasi anggaran;
 - g. Pengadaan barang/ jasa sesuai jadwal, alokasi anggaran, dan spesifikasi yang telah ditentukan;
 - h. Realisasi akan tercapai jika penyedia memenuhi kewajiban penyediaan koran dan majalah sesuai perjanjian kerja sama dan alokasi yang telah ditentukan;
 - i. Kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD dalam pelaksanaannya seringkali tidak dapat diprediksi karena bergantung kepada kebutuhan koordinasi atau undangan dari instansi/ penyelenggara kegiatan;
 - j. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dalam pelaksanaannya seringkali tidak dapat diprediksi karena bergantung kepada kebutuhan koordinasi atau undangan dari instansi/ penyelenggara kegiatan

- k. Realisasi tercapai sesuai target yang telah ditentukan;
 - l. Kerusakan/perbaikan terhadap pelartan dan mesin lainnya seringkali sesuai kebutuhan dan tidak dapat diprediksi
 - m. Adanya kerja sama yang baik dengan penyedia barang/ jasa;
 - n. Kerusakan/perbaikan terhadap kendaraan dinas seringkali sesuai kebutuhan dan tidak dapat diprediksi;
 - o. Kerusakan/ perbaikan terhadap peralatan kantor seringkali sesuai kebutuhan dan tidak dapat diprediksi;
 - p. Kerusakan/ perbaikan terhadap gedung kantor seringkali sesuai kebutuhan dan tidak dapat diprediksi.
2. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Promosi Penanaman Modal terealisasi anggaran sebesar 82,36% atau Rp 374.212.000 dari total program pagu sebesar Rp 454.360.000 sedangkan realisasi fisiknya mencapai 100%, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan KADIN Kota Bekasi terkait persiapan pelaksanaan Road to Bekasi Investment Gathering (BIG) ke – 2;
 - b. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi terkait data UMKM binaan sebagai peserta kemitraan dengan Pelaku Usaha;
 - c. Koordinasi dengan Pelaku Usaha terkait perjanjian kerjasama/kemitraan dengan UMKM binaan Pemerintah Kota Bekasi;
 - d. Melaksanakan giat Talk Show Road to Bekasi Investment Gathering (BIG) ke-2;
 - e. DPMPTSP Kota Bekasi bekerjasama dengan Bank BJB Cabang Bekasi menyelenggarakan acara BIG HUG (Bekasi Investment Gathering Harmonious Urban Governance).
 - f. Mengadiri kegiatan IKM Hunter Goes to Bekasi yang diselenggarakan oleh KADIN Kota Bekasi;
 - g. Mengikuti kurasi UMKM guna mendukung seleksi produk UMKM unggulan untuk GO Eksport, Go Retail, dan Go Internasional;
 - h. Melaksanakan kegiatan Bekasi Investment Gathering (BIG) Tahun 2024 dengan tema “Mengusung Jejaring dan Kemitraan untuk Investasi Tumbuh di Kota Bekasi”.
3. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal pagu awal sebesar Rp 5.309.872.500 (Lima miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdapat perubahan pengurangan pagu anggaran dikarenakan pergeseran yaitu total pagu Rp 4.653.012.500 dengan

realisasi sebesar 88,14% atau Rp 4.101.044.465 sedangkan realisasi fisiknya mencapai 100%, penyerapan tersebut di dukung dengan beberapa pelaksanaan kinerja antara Lain :

- a. Target pelaksanaan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik dari target 11.000 pelaku usaha terealisasi sebesar 11.000 pelaku usaha atau 100%, sedangkan target dari jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha target sebesar 500 kegiatan terealisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 500 Kegiatan usaha atau 100%, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 88,14% dalam mendukung capaian Nilai IKM.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

- a. Tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di MPP dan GPP, sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan pada MPP dan GPP;
- b. Pengolahan data perizinan dilakukan secara konsisten dan terjadwal sehingga proses penyelesaian pelaporan data dapat diselesaikan tepat waktu;
- c. Maintenance/pengelolaan sistem merupakan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan publik berbasis online sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi;
- d. Pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kota Bekasi Ta 2024;
- e. Pelaksanaan evaluasi survey kepuasan masyarakat (SKM) dan penyesuaian standar pelayanan berdasarkan regulasi terbaru;
- f. Pelatihan Service Excellent Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik yang menjadi satu poin penilaian kepatuhan oleh Ombusman RI.

Realisasi tersebut di dukung dengan Tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan dan Melakukan koordinasi antar bidang terkait dengan tindaklanjut pengaduan serta mengevaluasi Gerai pelayanan pada MPP dan GPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat pertriwulan.

4. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Pada program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 433.433.000 (Empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terdapat perubahan penambahan pagu anggaran dikarenakan pergeseran dengan total pagu Rp. 610.933.000 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.567.925.256 (Lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dari serapan anggaran tersebut terserap realisasi anggaran sebesar 92,96% dan realisasi fisik sebesar 100%, Pada indikator sub kegiatan tersebut adalah Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola terealisasi sebanyak 4 sistem yang dikelola dari target 4 sistem yang sudah dilaksanakan. Untuk sistem yang dipelihara ada 12 dokumen hingga bulan Desember dari target 12 dokumen dalam 1 Tahun.

Adapun langkah-langkah tindaklanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKM yang meningkat di DPMPTSP adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Inovasi dalam IT pelayanan perizinan melalui sistem online;
 - b. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - c. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan mindset (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat).
5. Penyerapan kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal Tahun 2024 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 690.178.000 (*enam ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pagu sebesar Rp.62.276.000;
 2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha pagu sebesar Rp.228.349.000;
 3. Pengawasan penanaman modal pagu sebesar Rp.399.553.000.
- realisasi dari ketiga sub kegiatan tersebut di dapat dari sub kegiatan tersebut sebesar Rp.654.914.000 (*Enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah*) atau 94,89% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Realisasi tersebut di dapat dari

- 1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya terealisasi sebesar Rp.61.396.000;
- 2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha terealisasi sebesar Rp.218.447.000;
- 3. Pengawasan penanaman modal terealisasi sebesar Rp.375.071.000.

Faktor Penentu Keberhasilan:

- 1. Kunjungan kepada pelaku usaha wajib di lakukan minimal 2 kali kunjungan dan untuk non UMK minimal 1 kali kunjungan.
- 2. Memberi surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk lapor LKPM melalui email, kepada pelaku usaha di Kota Bekasi.
- 3. Sosialisasi LKPM melalui media sosial Twitter, Instagram DPMPTSP, dan kunjungan ke pelaku usaha di Kota Bekasi.
- 4. Konsultasi di tempat perihal pelaporan LKPM di lobby Kantor DPMPTSP;
- 5. Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal ditunjang oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) fasilitas penanaman modal dalam melakukan sosialisasi ataupun bimbingan Teknis kepada pelaku usaha;
- 6. Pelaksanaan sosialisasi perizinan berusaha dan pelaporan LKPM kepada pelaku usaha;
- 7. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.

Secara garis besar capaian kinerja keuangan dan fisik merupakan capaian kinerja untuk mencapai target indikator urusan, indikator program dan indikator kegiatan. Pencapaian indikator urusan yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) merupakan satu hal yang penting mengingat peran dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan Urusan Penanaman Modal.

Adapun realisasi kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2024 pada indikator kinerja Utama (IKU) pada DPMPTSP Kota Bekasi pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
CAPAIAN KINERJA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	A	A (84,97)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	86	88,01	102,33
3.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	%	4	68,79% (20.912 Pelaku Usaha)	1,719%

Sumber data: Bidang Penata Kelola Penanaman Modal, Bidang Penata Perizinan

Dari tabel capaian kinerja di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP” ditetapkan target Nilai (LHE) AKIP yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 84,97 dengan nilai realisasi sebesar 84,97 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,85%;
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target indeks Tahun 2024 sebesar 86 dengan realisasi sebesar 88,01 dimana capaian kinerjanya mencapai 102,33%.
3. Sasaran strategis lainnya yaitu “Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi” dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 4% dengan realisasi sebesar 68,79% (20.912) sehingga capaian kinerjanya bernilai negatif sebesar 1.719%.

Tiga sasaran strategis di atas berkinerja cukup bagus sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan, Kemudian sasaran strategis dalam rangka Peningkatan Nilai Investasi Daerah tahun 2024 ini sudah melampaui target yang telat ditetapkan. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program kinerja yang mendukung pencapaian Indikator Utama DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2024

	MISSION/TARGET/ GOAL/ PROGRAM DEVELOPMENT AREA	PERFORMANCE INDICATOR (GOAL/IMPACT/ OUTCOME)	UNIT	TARGET YEAR 2024	REALIZATION sd TRIWULAN IV	PERFORMANCE INDICATOR
1.	Support Program Government Affairs District/City	Optimization Improvement of Facilities and Infrastructure Apparatus	%	100	100%	100%
		Optimization of Service Administration Office	%	100	100%	100%
		Optimization Development of System Report Performance Indicator and Finance	%	100	99,12%	99,12%
2.	Program Service Investment	Percentage of issuance Permit in accordance with SOP	%	100	100%	100%
3.	Program Management Data and System Information Investment Modal	Number of Information System Investment Modal that Managed	Number	4	4	100%
4.	Program Development of Climate Investment Modal	Percentage of Increase New Investor	%	4	47%	1.175%
5.	Program Promotion Investment Modal	Number of Business Actors who Obtain Information and Potential and Investment Opportunity	Number	12.000	42,352%	352,93%
6.	Program Control Implementation Investment Modal	Percentage of Increase Number of Companies PMDN/PMA Who Comply With Obligations LKPM	%	16% (target di RPD)	95,79%	598%
				14,5% (target di Renstra)	95,79%	660%

Ada 9 (sembilan) Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2024 yang Mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Pada DPMPTSP yaitu :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pada APBD Perubahan pelaksanaan program untuk 19 (sembilan belas) sub Kegiatan pada masing-masing indikator program telah tercapai pada Tahun 2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 3 Indikator yaitu
1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;**4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Penjelasan capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dokumen yang terealisasi sampai dengan triwulan IV antara lain :
 - Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan 1, 2, 3, dan 4;
 - Dokumen Renja Tahun 2024, Dokumen Renja Tahun 2025;
 - Dokumen SAKIP;
 - Dok Renstra 2024-2026;
 - Dokumen ZI WBK;
 - Dokumen Reformasi Birokrasi;
 - Dokumen LKIP dan;
 - b. Evaluasi kinerja triwulan IV
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik 100%;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik 100%.
2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik sebesar 100%;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan alokasi anggaran s.d. Triwulan IV. Untuk dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sudah tersusun dengan realisasi fisik 100%.
3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan pegawai dalam bimbingan teknis sebanyak 3 (tiga) orang dengan realisasi fisik sebesar 100%.
4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, antara lain :

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor realisasi fisik sebesar 100%;
 2. Penyediaan bahan Logistik Kantor realisasi fisik sebesar 100%;
 3. Penyediaan cetakan dan penggandaan realisasi fisik sebesar 100%;
 4. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi fisik sebesar 100%;
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi Fisik 100%;
 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi fisik sebesar 100%;
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi fisik sebesar 100%;
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi fisik sebesar 100%;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Pelayanan Penanaman Modal

Terdapat 1 (Satu) indikator pada Program Pelayanan Penanaman Modal, yaitu:

1. Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP;

Pada indikator Program tersebut yaitu persentase penerbitan perizinan sesuai SOP realisasi 100% sampai dengan Triwulan IV dari target 100% di ambil dari realisasi jumlah izin terbit sesuai SOP sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Triwulan III yaitu sebesar 25% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah izin terbit melalui OSS dan SILAT

sebanyak 80,207 izin terbit.

Realisasi tersebut di dukung dengan adanya Tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) dan Melakukan koordinasi antar bidang terkait dengan tindaklanjut pengaduan serta mengevaluasi Gerai pelayanan pada MPP dan GPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat pertriwulan.

Pada indikator kedua untuk program Pelayanan Penanaman Modal sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal tidak dialokasikan anggaran Tahun 2024 namun pencapaian kinerja tersebut terealisasi fisik sebesar 100%.

Indikator Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik telah dilaksanakan Realisasi di ambil dari jumlah izin terbit sebanyak 80.207 izin dengan jumlah total pemohon sebanyak 80.207. Hal tersebut tercapai dengan melakukan evaluasi sistem, SOP, sarana dan prasarana pendukung pelayanan pengaduan, evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan telah dilaksanakan, dengan hasil evaluasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan pegawai Front Office terbaik setiap bulannya, Evaluasi Gerai pelayanan pada MPP dan GPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat pertriwulan.

C. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Terdapat 1 (satu) Indikator pada program ini yaitu **Jumlah sistem informasi penanaman modal yang dikelola**. Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola dari target 4 jumlah dengan realisasi jumlah 4 sistem yang di pelihara. 4 (empat) sistem tersebut terdiri dari : silat, siibeken, simple antri dan website.

Realisasi tersebut di dukung dengan adanya Ketercapaian maintenance sistem dengan target dapat terlaksana dengan baik, Tersedianya sarana dan prasarana di lokasi pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di MPP dan GPP, sehingga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan jumlah jenis layanan pada MPP dan GPP serta Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala untuk menunjang kegiatan dan proses pelayanan dan perizinan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Tindaklanjut pada triwulan IV untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKM yang meningkat di DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana aksi atas hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP);
2. Melakukan pengelolaan sistem, sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung pelayanan pengaduan;
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan tela dilaksanakan, dengan hasil evaluasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan pegawai Front Office terbaik setiap bulannya;
4. Melakukan evaluasi Gerai pelayanan pada MPP telah dilaksanakan pada setiap bulannya, penyampaian hasil evaluasi kepada OPD dan instansi vertikal terkait disampaikan melalui surat per triwulan;
5. Implementasi sistem IKM online melalui SILAT pada DPMPTSP yang terintegrasi dengan Sisukma;
6. Pembuatan website investasi DPMPTSP Kota Bekasi yang bertujuan untuk melakukan simplikasi atau penyerderhanaan menu yang mudah dipahami (user friendly) tanpa mengurangi isi dari website dan mengintegrasikan saluran-saluran informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

D. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu **Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi dan potensi dan peluang investasi.**

Pada indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi dan potensi dan peluang investasi realisasi capaian kinerja Pada Indikator tersebut sampai dengan Triwulan IV adalah 132% dari target Tahunan sebesar 12.000.

Realisasi didapat dari NIB terbit tahun berjalan sebanyak 42,158 di bagi dengan Jumlah NIB existing sebanyak 32.056 di kali 100%. Hal tersebut diatas sesuai dengan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP yang dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dengan menggunakan sistem OSS berbasis resiko (OSS RBA) oleh Kementrian Investasi dan BKPM RI dan Peraturan Kepala BKPM serta Kepwal Nomor : 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor :060/Kep.271- Org/VIV/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

E. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini memiliki satu indikator utama, yaitu **Persentase Peningkatan investor baru**.

Pada indikator program yaitu Persentase Peningkatan Investor Baru dengan realisasi 125% sampai dengan Triwulan IV dari target 4% di ambil dari realisasi jumlah NIB terbit sebanyak 42.158 di bagi KBLI aktif sebanyak 90.103 di kali 100%.

Realisasi tersebut didukung Berdasarkan data jumlah penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal dan perkembangan penanaman modal di Kota Bekasi menunjukkan kondisi yang baik, walaupun jumlah penanaman modal atau investor skala nasional maupun asing masih fluktuatif. Meskipun iklim investasi di Kota Bekasi semakin membaik dan meningkat setiap tahunnya, masih ada kendala lain yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang mampu menghambat kemajuan perusahaan yang beroperasi di Kota Bekasi. Kendala tersebut seharusnya menjadi perhatian utama dan juga tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi untuk dapat menemukan solusi terbaik agar tercipta kenyamanan, keamanan dalam berinvestasi serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha yang menanamkan modal mereka di Kota Bekasi.

F. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program tersebut memiliki 1 (satu) Indikator yaitu **Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM**.

Pada APBD pelaksanaan program untuk 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dari indikator program Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM dengan realisasi fisik 100%. Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM dengan realisasi 14,852 dari target 14,5% /Renstra, berbeda dengan target RPD yaitu 16% dengan realisasi 68,03%. Realisasi program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sampai dengan Triwulan IV dari BKPM.

Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun dengan maksud agar setiap perencanaan dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat

tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, DPMPTSP Kota

Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi mengacup ada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020-2024. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam hal ini urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal.

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 1 yaitu Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Misi I RPD 2024-2026 sesuai dengan tujuan / sasaran/program pembangunan daerah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis, inovatif dan akuntabel, karena nilai stabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP
TAHUN 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIANKINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai(LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	-	83,75	83,80	83,85	A	83,63	84,47	84,60	84,57	A (84,97)	115	100,85 %	101	100,85	100%

****Sumber data: Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi S/D Tahun 2024,Diola***

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Tahun 2020 tidak ada penentuan target untuk nilai LHE AKIP DPMTSP. Baru ditahun 2021-2024 pada renstra perubahan, penyesuaian indikator dan target tersebut dimasukkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara kuantitas Nilai (LHE) AKIP DPMTSP s/d tahun 2024 dapat mempertahankan capaian kinerja dengan prosentase capaian 100% dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja A. Walaupun Indikator Kinerja Sasaran Nilai (LHE) AKIP DPMTSP di Tahun 2023 terdapat penurunan capaian kinerja dari 84,60 pada tahun 2022 menjadi 84,57 pada tahun 2023 atau mengalami penurunan nilai sebesar 0,03.

Pada Tahun 2025 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Evaluasi SAKIP dilaksanakan setelah pelaksanaan tahun anggaran, sehingga pada saat penyusunan laporan kinerja ini belum dilakukan evaluasi oleh APIP. Adapun target capaian AKIP tahun 2025 adalah A. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Nilai (LHE) AKIP adalah hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Kota Bekasi atas Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang tak terpisahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi serta memberikan gambaran semangat Kota Bekasi dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survey ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Adapun capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.5
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT(IKM)PELAYANAN PERIZINANDAN NON PERIZINAN TAHUN 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIANKINERJA				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	82,80	82,90	83	83,10	86	82,80	84.11	89,82	85,31	88,01	100	101,45	108,21	102,65	102,33%

*Sumberdata: Renstra2024-2026, Data LKIP dan Renja terhadap DPMPSTSP Kota Bekasi Tahun 2020 s.d 2024

Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, pada Tahun2020-2024 selalu mencapai target.

Dengan melihat data historis selama lima tahun terakhir rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di Kota Bekasi adalah sebesar 76,61-88,30 atau dengan nilai mutu “B” sampai dengan Tahun 2024. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bekasi terus melakukan berbagai upaya perbaikan khususnya yang terkait dengan peningkatan waktu penyelesaian

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja utama ke 3 yaitu Indikator kinerja yaitu nilai realisasi investasi PMDN dan PMA sampai dengan Tahun 2024 merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investor baru dengan meningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri. Investasi PMDN/PMA terjadipeningkatan yang cukup tinggi sejak Tahun 2020 s.d 2024, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan realisasi Investasi capaian tahunan, seperti dalam table 2.5 di bawah ini

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Realisasi Investasi Kota Bekasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Tahun 2024 indikator sasaran berubah menjadi persentase peningkatan pelaku usaha yang berinvestasi di Tahun 2024	10%	4%	4%	4%	-	- 14,83%	22,6%	63,27%	-7,17%	-	- 148,3%	565%	1.582%	-179%	-
		-	-	-	-	-	-	Rp8.167.096.033.071	Rp13.334.763.157.830	Rp12.378.837.008.972	-	-	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	-	-	-	4%	-	-	-	-	68,79%	-	-	-	-	1.719%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi investasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ada peningkatan dan penurunan nilai realisasi investasi tersebut. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak tercapai dari target karena adanya pernyataan tertulis yang diberlakukannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) dan sesuai Peraturan PerkaBKPM No.7 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan

penanaman modal bahwa realisasi investasi harus berdasarkan LKPM/SPIPISE, Kurangnya kepatuhan para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM, Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan mekanisme Sistem Pelaporan Penanaman Modal (LKPM) pasca diberlakukannya OSS, sehingga banyak LKPM tidak akurat, Perubahan system penghitungan realisasi nilai investasi yang hanya menggunakan LKPM sebagai satu-satunya sumber data dan tidak menggunakan data non LKPM (SIUP) sebagai sumber data investasi, sehingga realisasi investasi tidak sepenuhnya dapat dihitung, dan Adanya penetapan target investasi (10%) yang tidak rasional, melebihi kenaikan target investasi nasional yang hanya naik 4%.

Pada Tahun 2020 nilai realisasi investasi juga menurun sebesar -14,83% dari Target sebesar 10%, realisasi tersebut tidak tercapai dari target dikarenakan adanya situasi pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan investasi khususnya yang ada di Kota Bekasi, Keterbatasan potensi investasi di Kota Bekasi diantaranya keterbatasan lahan sebagai potensi dasar sehingga sulit dalam pengembangannya, antara lain : property, konstruksi, perdagangan dan jasa yang selama ini masih jadi andalan investasi di kota Bekasi. Melihat perkembangan Pada Tahun 2019, sektor konstruksi merupakan potensi realisasi investasi yang dominan memberikan kontribusi seperti pembangunan elevated tol, LRT, KCIC, jalan tol Cimanggis-Cibitung yang pekerjaannya masuk wilayah Kota Bekasi. Tetapi di Tahun 2020, sektor tersebut di atas sudah masuk tahap penyelesaian.

Jika dikaitkan dengan realisasi investasi pelaksanaan kegiatan pada penanaman modal tersebut juga didorong melalui sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan dengan PMA dan PMDN adalah Meningkatkan Kemampuan Ekonomi dan Realisasi Investasi UMKM di Kota Bekasi;

2. Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi adalah “Informasi Potensi Investasi untuk Mencapai Realisasi Investasi PMA/PMDN.

Pada tahun 2021 Perubahan penurunan target investasi menjadi sebesar 4% dikarenakan penetapan target peningkatan nilai investasi yang melebihi kenaikan target Nasional dan provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 4%. Juga karena keterbatasan lahan sebagai potensi dasar investasi di Kota Bekasi. Serta adanya pandemic covid-19 yang menurunkan minat usaha masyarakat.

Pencapaian realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai 22,6% atas indikator persentase nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) sebesar 565%, sehingga capaian indikator pada tahun 2021 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan.

Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara door to door;
2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi.

Pada tahun 2022 target Investasi sebesar 4%, sementara realisasi mencapai 63,27%, maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar 1.582%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2022 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan. Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara door to door;
2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi;
4. Sosialisasi regulasi di Bidang Penanaman Modal yang dilakukan terhadap pelaku usaha.

Selain itu DPMPTSP Kota Bekasi telah melakukan Pameran Promosi Investasi UMKM Kota Bekasi pada Event Jogja Trade Investment Tourist and Small Medium Enterprises Expo pada Tanggal 23-25 Juni 2022 diJogja City Mall, Kota Yogyakarta. Hal tersebut diatas menjadi beberapa factor tercapainya realisasi dan capaian kinerja untuk Indikator Sasaran Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional.

Pada tahun 2023 target investasi sebesar 4%, sementara realisasi sebesar -7,17%, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar -179%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2023 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang belum mencapai target yang sudah ditentukan.

Pencapaian kinerja untuk indicator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2023 ini belum mencapai target yaitu sebesar -7,17%, factor penyebab kegagalan ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun beberapa faktor penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

1. Sosialisasi yang belum maksimal dan tidak mencapai keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi;
2. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi.

Sementara beberapa faktor penyebab eksternal terhadap kegagalan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
2. Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah;
3. Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
4. Pengolahan system evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu.

Pencapaian kinerja untuk indicator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2024 sudah mencapai target yaitu sebesar 10,7%, Adapun beberapa faktor penyebab internal dan eksternal yang dimaksudkan antara lain :

1. Tersedianya pelayanan berupa help desk di Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik di Kota Bekasi serta di Kantor DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal kepelaku usaha di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi;
3. Terlaksananya bimbingan teknis terkait implementasi perzinan berusaha dan kegiatan penyelesaian permasalahan serta hambatan ke pelaku usaha;

4. Peningkatan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Sementara beberapa factor penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :
6. Masih terdapat pengembangan proyek strategis nasional diKota Bekasi yang dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bekasi;
7. Peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur publik diKota Bekasi;
8. Meningkatnya kepatuhan pelakuusaha terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2025 target Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi sebesar 4%. sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 3,61% atau 19.658 pelaku usaha dengan capaian sebesar 90,38%. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pada DPMPSTSP Kota Bekasi pada Tahun 2020-2024 dengan rincian pada tabel 2.7, Tabel 2.8 dan tahun 2025 pada tabel 2.9 sebagai berikut

Tabel 2.7
Rekapitulasi Target dan Sasaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN					TINGKAT CAPAIAN SASARAN PADA TAHUN					PROYEKSI TINGKAT CAPAIAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2024
MisiKesatu: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPTSP	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Indeks	-	83,75	83,85	83,85	A	83,63	84,47	84,60	84,57	A(84,97)	-	100,85	101%	100,85	100%	100%
	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	Indeks	82,80	82,90	83,00	83,10	86	82,80	84,11	89,82	85,31	88,01	100	101,45%	108,21%	102,65%	102,33%	102,33%
MisiKetiga: Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	Peningkatan daya saing investasi daerah	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persen (%)	10%	4%	4%	4%	-	-	22,6% Rp.8.167.096.033.071	63,27% Rp.13.334.763.157.830	-7,17 (Rp.12.378.837.008.972)	-	148,3%	565%	1.582%	-179%	1.719%	-
				-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-	68,79%	-	-	-		1.719%	1.719%

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja
Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISA
				TAHUN 2020 (THNN-2)	TAHUN 2021 (THNN-1)	TAHUN 2022(THN N+1)	TAHUN 2023(THN N+1)	TAHUN 2024 (THNN+1)	TAHUN2020 (THN N-2)	TAHUN 2021 (TNN N-1)	TAHUN 2022 (THNN+1)	TAHUN 2023 (THNN+1)	TAHUN 2024 (THNN+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Nilai(LHE)AKIP DPMPTSP	-	NilaiAKIPdihitungberdasarkanhasil nilaidanbobotdarisetiapkomponen AKIP NilaiAKIPdinyatakandalampredikat AA(>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65),C(>30-50),D(0-30)	-	83.75	83.80	83.85	A	83,63	83.75	84,60	84,57	A(84,97)	100%
2.	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) PelayananPerizinan dan Non Perizinan	-	Rumus: NRR=NilaiRataRata(diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1s.dU9=Unsur-unsurpelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan) Rumus: IKM=TotaldariNilaiPersepsiPer UnsurX <u>Nilai Penimbang</u> x 100 TotalUnsur yang Terisi IKM=JumlahNRR TertimbangX25	82,80	82,90	83,00	83,10	86	82,80	84.11	89,82	85,31	88,01	102,33%
3.	Persentase Peningkatan Nilai InvestasiBerskala Nasional (PMDN/PMA)	-	Rumus: NilaiInvestasi(TahunN)-Nilai Investasi <u>(Tahun N-1) x 100</u> Nilai Investasi N-1	10% (Rp.12.656 .664.740.8 08,00)	4%	4%	4%	-	-14,83% (Rp6.661.394. 899.708)	22,6% Rp.8.167.096.0 33.071	63,27 Rp. 13.334.763 .157.830	-7, 17 (Rp.12.378 .837.008.9 72)	-	-
	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi		Rumus: Jumlah pelaku Usaha (TahunN - Jumlah <u>Pelaku Usaha (Tahun N-1) X 100</u> Jumlah Pelaku Usaha N-1	-	-	-	-	4%	-	-	-	-	68,79%	1.719%

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis juga tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama pada DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2024-2026 dengan rincian pada tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024-2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGETRENSTRASKPD			REALISASICAPAIAN			CATATAN ANALISA
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	-	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(>85),A(>75-85),B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50), D(0-30)	A	A	A	A (84,97)	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PerizinandanNon Perizinan	-	Keterangan: NRR=Nilai Rata-Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan) NRR perunsur= Jumlah Nilai per unsur di bagi jumlah kuesioner yang terisi. Rumus * : <u>IKM=Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Penimbang</u> Total Unsur yang Terisi IKM=Jumlah NRR Tertimbang X 25	86	86,10	86,20	88,01	88,56 Sd tw2	-	-
3.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yangBerinvestasi	-	Jumlah Investasi di Kota Bekasi berdasarkan laporan Penanaman Modal dari LKPM. Rumus*: <u>Jumlah Pelaku Usaha (Tahun N)-Jumlah Pelaku Usaha (Tahun N-1) X 100</u> Jumlah Pelaku Usaha N-1	4%	4%	4%	68,79%	107,85% Sd tw 2	-	-

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.

Dalam merumuskan isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, dilakukan proses identifikasi terhadap berbagai dinamika lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal organisasi. Proses ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perangkat daerah, seperti kebijakan nasional, kondisi sosial-ekonomi daerah, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya. Selanjutnya, isu-isu tersebut dirumuskan menggunakan teknik yang sistematis guna memastikan bahwa isu yang ditetapkan benar-benar bersifat strategis, berdampak luas, dan membutuhkan respon kebijakan jangka menengah.

Untuk menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Kota Bekasi sebagaimana uraian penjelasan di atas, DPMPTSP Kota Bekasi mengidentifikasi dua aspek utama yang menjadi fokus perhatian yaitu:

1. Pengembangan peta dan penyusunan potensi investasi serta Kajian *IPRO* (*Investment Project Ready to Offer*) yang digunakan untuk menawarkan investasi di Kota Bekasi yang difasilitasi oleh DPMPTSP Jawa Barat yang memiliki daya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain;
2. Reformasi pelayanan perizinan, khususnya dalam rangka implementasi regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Selain itu, dalam konteks global, nasional, dan regional, terdapat dinamika lingkungan yang turut mempengaruhi penyusunan isu strategis DPMPTSP. Secara global, ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia berdampak pada menurunnya minat investasi lintas negara. Di tingkat nasional, arah kebijakan investasi lebih difokuskan ke luar Pulau Jawa, Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi tergolong tinggi dibandingkan beberapa daerah sekitarnya. Berdasarkan data tahun 2024, UMR Kota Bekasi mencapai Rp5.343.430, yang menjadi salah satu UMR tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kenyataannya justru memunculkan dampak lanjutan terhadap aktivitas investasi dan kelangsungan operasional perusahaan. khususnya Kalimantan dan kawasan

pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), sehingga mengurangi konsentrasi investor di wilayah Jabodetabek. Di sisi regional, belum optimalnya kerja sama antar daerah di Jawa Barat dalam hal promosi dan pembagian peran strategis investasi, serta tingginya populasi UMKM di Kota Bekasi menambah kompleksitas pengembangan daya saing daerah. Adapun Isu Strategis DPMPTSP Kota Bekasi yaitu Penguatan fungsi dan peran DPMPTSP dalam peningkatan koordinasi / kolaborasi antar wilayah di Jawa Barat dalam mengarahkan potensi investasi yang khas serta kewenangan DPMPTSP untuk memastikan layanan perizinan yang cepat, mudah, dan murah khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan peran dinas teknis terkait Percepatan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang dikemukakan oleh Kementerian Investasi/ BKPM, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Adapun isu strategis Kementerian Investasi/ BKPM Tahun 2026 tersebut adalah :

1. Menyederhanakan proses perizinan dan regulasi untuk menarik lebih banyak investasi;
2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur (transportasi, energi, digital) untuk mendukung kegiatan investasi.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan industri.

Strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Kemitraan antara UMKM dan Investor, Menggelar **Bekasi Investment Forum** dan partisipasi dalam expo nasional/internasional untuk menarik investor di sektor manufaktur, properti, dan jasa. Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam perbaikan iklim penanaman modal yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Investasi/ BKPM dalam rencana aksinya antara lain :

- ❖ Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- ❖ Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP di Kota Bekasi);

- ❖ Sinergi dengan Kementerian Investasi/BKPM, BI, Kadin, dan pelaku usaha;
- ❖ Penguatan kemitraan UMKM dengan investor besar;
- ❖ Penyelenggaraan forum bisnis dan temu usaha secara berkala;
- ❖ Terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi;
- ❖ Penataan kelembagaan DPMPTSP agar lebih adaptif terhadap dinamika investasi;
- ❖ Penerapan sistem merit dalam penempatan pejabat teknis pelayanan;
- ❖ Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan berbasis kepuasan investor.

Pemerintah Kota Bekasi, khususnya DPMPTSP Kota Bekasi terus melaksanakan dan menyempurnakan berbagai instrumen kebijakan yang dapat menjaring dan meningkatkan minat investasi sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai dan terealisasi, salah satunya dengan memberikan kemudahan proses perizinan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2026 untuk meningkatkan realisasi capaian kedepannya ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan DPMPTSP yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi, kebijakan tersebut diantaranya :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
2. Kajian *IPRO (Investment Project Ready to Offer)* yang digunakan untuk menawarkan investasi di Kota Bekasi yang difasilitasi oleh DPMPTSP Jawa Barat;
3. Melakukan penindakan langsung kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melakukan sosialisasi pembinaan dan pengawasan lapangan dengan target pelaku usaha yang lebih banyak dari pada tahun sebelumnya;
5. Peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan pengawasan perizinan berusaha untuk pegawai di DPMPTSP Kota Bekasi;
6. Menyediakan sarana dan prasarana promosi dan Melaksanakan promosi penanaman modal;;
7. Mengumpulkan data penyusunan kebijakan (PERDA, PERWAL, KEPWAL, SK Wali Kota) terkait strategis promosi penanaman modal;
8. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;

9. Memfasilitasi investor dengan meyakinkan investor bahwa Kota Bekasi “ramah investasi”;
10. Mengikuti kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
11. Menyusun RUPM sebagai acuan bagi Pemkot Bekasi dalam membuat kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal;
12. Membuat aplikasi terbaru dan video potensi peluang investasi untuk memudahkan investor dalam mencari informasi baik perizinan maupun pendukung investasi;
13. Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW);
14. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
15. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi;
16. Meningkatkan peran DPMPTSP Kota Bekasi dalam pengembangan potensi investasi di Kota Bekasi;
17. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi;
18. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;
19. Mengoptimalkan kegiatan dalam promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
20. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan dekat yang bertujuan menumbuhkembangkan minat para investor atau calon investor dalam mengembangkan investasinya di Kota Bekasi;
21. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
22. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima masyarakat.

2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD).

Mengacu kepada RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan yang ada, hasil analisis kebutuhan ini nantinya dituangkan pada Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan Program, kegiatan dan

sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.503406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan tahun 2026, selain memperhatikan rancangan RPJMD 2025-2029 Kota Bekasi serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang yang dimulai dari Pra Musrenbang Kelurahan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (bottom-up). Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD yang di tuangkan ke dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2026. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	28.463.540.340	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	26.561.416.340	
			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	92%		
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	84%		
								4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang	100%		

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	165.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	8 Dokumen	6.000.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	4.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	24.049.337.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	23.453.003.000	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.208 Orang /Bulan	24.034.337.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.020 Orang /Bulan	23.448.003.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	5.000.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	328.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	50.000.000	
5.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	1 paket	278.750.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah paket pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan	0 paket	-	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	50.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.241.593.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	7 Laporan	1.160.000.000	
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	21.533.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 paket	-	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	420.000.000	
10.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	
12.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.060.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	265.447.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	20 Unit	265.447.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.771.753.340	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	4 Laporan	1.290.753.340	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	736.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000	
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.035.753.340	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	690.753.340	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	641.660.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	4 Laporan	601.660.000	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	86.660.000	
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	240.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	75.000.000	
21.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	215.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
II.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Investor Baru	4%	255.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Bekasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	4%	255.000.000	
8.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	55.000.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	55.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	75.000.000	
9.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	100%	200.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi provinsi	Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	100%	150.000.000	
23.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	-	-	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi	13.000 Pelaku Usaha	350.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	100%	350.000.000	
10.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggara n Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	
24.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP	100%	5.451.684.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	4.293.000.000	
11.	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.451.684.000	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.293.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	365.000.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	218.000.000	
26.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	12.000 Pelaku Usaha	4.926.950.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	13.000 Pelaku Usaha	4.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27.	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	550 Kegiatan Usaha	159.734.000	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	
V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase peningkatan jumlah Perusahaan PMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	15%	475.000.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Kota Bekasi	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	23,5%	600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	475.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	600.000.000	
28.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Bekasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Bekasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan Usaha	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	200.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30.	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	275.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	
VI.	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	4	525.319.070	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	525.319.070	

No	Rancangan Awal RKPD TA 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	100%	525.319.070	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	100%	525.319.070	
32.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	525.319.070	
			BLPU		28.463.540.340			BLPU		26.561.416.340	
			BLU		7.057.003.070			BLU		5.993.319.070	
			Total Anggaran		35.520.543.410			Total Anggaran		32.554.735.410	

Untuk Target pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024-2026 terdapat beberapa perbedaan dan sudah dilakukan dengan metode sandingan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Renstra Tahun 2024-2026 beserta alasannya, data tersebut dapat dilihat di **Tabel 2.11** sebagai berikut :**L 2.10**

**L 2.10 SANDINGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI**

KODE			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RPD					RENSTRA				
					Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir	Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah Perusahaan PMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	10,5%	16%	21%	26%	26%	14%	14,5%	15%	15,5%	15,5%

Target Kinerja Program di Renstra Mengalami Perubahan Seperti diatas dikarenakan :

- Penghitungan target untuk realisasi tahun 2018-2023, masih menggunakan target yang di tetapkan diawal RPJMD 2018-2023 sebanyak 4310 pelaku usaha yang memiliki izin;
- untuk kondisi awal yang akan digunakan, penghitungan dasar Tahun 2024 menggunakan data terbaru realisasi investasi yang ada sistem OSS RBA Tahun 2021 sebanyak 21.830 pelaku usaha yang sudah memiliki izin (NIB) dan realisasi jumlah pelaku usaha yang tertib/patuh LKPM sebanyak 3115 di Tahun 2021 :

$$\frac{\text{jumlah perusahaan PMA PMDN yang patuh LKPM}}{21830} \times 100\%$$

$$= \frac{3115}{21830} \times 100\% = 14\% \text{ jumlah perusahaan PMA PMDN}$$
- Pelaku usaha yang tertib lapor LKPM menggunakan data terupdate Tahun 2021, untuk rumusan tidak ada perubahan.

2.3 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setelah pengimplementasian Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran secara online di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah di Kabupaten/Kota, anggota dewan dan masyarakat umum dapat secara langsung mengusulkan program dan kegiatan untuk perangkat daerah. Hasil usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Forum Musrenbang Kabupaten/Kota.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lainnya pada usulan Musrenbang kabupaten/kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan misi Presiden Terpilih Periode 2024-2029 menetapkan tema pembangunan “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, yang merupakan bagian dari RPJPN 2025-2045, dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis serta berdaulat melalui penguatan persatuan bangsa.

RPJMN 2025-2029 menjadi landasan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Emas. Penguatan transformasi ekonomi menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan pembangunan 2045, termasuk infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Dalam perencanaan pembangunan 2026, yang menyatukan sistem perencanaan Kota Bekasi dengan nasional dan provinsi, pelaksanaan dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Rencana tata ruang diintegrasikan dengan rencana pembangunan, berdasarkan kondisi dan potensi daerah. Penyusunan Renja DPMPTSP menyesuaikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD dan RKPD 2024-2026.

Tema pembangunan daerah pada Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi 2026 adalah “Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Lingkungan serta Kemantapan Perekonomian”. Sasaran pembangunan 2026 adalah mencapai target RPJMN 2025-2029 dan menciptakan fondasi kokoh untuk pembangunan periode 2025-2029 melalui :

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator : (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP BKPM Tahun 2026, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu:

- 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;

- 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) penguatan daya saing usaha;
- 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energy;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dan
- 7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara.

Dalam mendukung prioritas Pembangunan Nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi berperan membantu Wali Kota dalam urusan pemerintahan terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas ini berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan nilai investasi daerah. Hal ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, yang dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan serta menghapus kemiskinan ekstrem.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Bekasi

a. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan didefinisikan sebagai kondisi atau capaian yang direncanakan untuk diwujudkan dalam rentang waktu lima tahun. Proses perumusan tujuan ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam memperbaiki arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai selama periode 2025 hingga 2029.

Dalam pelaksanaan rencana kerja DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut: Tujuan rencana kerja :

1. **Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah;**

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi.

Indikator : **Peringkat Realisasi Investasi Kota Bekasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat**

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Perumusan Tujuan Renstra DPMPTSP yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka dapat dirumuskan 1 (satu) sasaran Renstra DPMPTSP, yaitu : Sasaran rencana kerja :

1. **Meningkatnya Nilai Investasi Daerah;**
- Sasaran ini upaya untuk untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui implementasi investasi yang konkret dan berkelanjutan.
- Indikator : **Persentase Peningkatan Nilai Investasi.**

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
				2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	-	Peringkat Realisasi Investasi Kota Bekasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat	5
		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	4%

Sumber data : Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya atau langkah nyata, yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan alokasi sumber daya tertentu, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Kegiatan perangkat daerah merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka pencapaian hasil (outcome) suatu program.

Adapun program pembangunan yang menjadi prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan tugas DPMPTSP adalah:
**“Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi
Pembangunan di Kota Bekasi (KoBe Menarik)”**

Dalam menyelaraskan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas, Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 disusun untuk menjadi acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi pada proses pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026.

Dalam penyusunan program dan kegiatan, DPMPTSP memiliki 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (duapuluh delapan) Sub Kegiatan dari Belanja Langsung Urusan dengan total anggaran sebesar Rp 32.554.735.410,- (tiga puluh dua milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota :

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;**
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;**
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah;**
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya memberikan iklim investasi yang kondusif, bertujuan menambah daya tarik investor dalam berinvestasi serta sosialisasi potensi investasi, meningkatkan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi. Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat.

Terdapat 2 (dua) kegiatan pada program ini, yaitu :

1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan pada kegiatan ini yaitu :

- Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan pada ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan, Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- **Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota.**

Terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan dari Kegiatan ini, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;

1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dimana tujuannya untuk mengembangkan sistem pelayanan sehingga seluruh pelayanan perizinan dapat dilakukan secara online. Kegiatan dari program ini yaitu :

- **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub Kegiatan dari Kegiatan di atas yaitu :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

5. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan arah pengembangan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi, dan realisasi investasi. Kegiatan dari program ini yaitu :

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan pada kegiatan ini, yaitu :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Bekasi. Tujuan program ini yaitu menjadi wadah bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku investasi di Kota Bekasi.

Kegiatan dalam program ini yaitu :

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu pada kegiatan ini, yaitu :

1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha;
3. Pengawasan Penanaman Modal.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program Nasional	Program Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Kegiatan Kota Berdasarkan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota sesuai PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; 2. Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten / Kota.
		2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
		4. Program Promosi Penanaman Modal.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
		5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel 3.2 Program Nasional, Program Kota dan Kegiatan Rumusan rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 secara lebih lengkap disajikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 (Rancangan Awal) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kota Bekasi	100% 92% 84% 100%	26.561.416.340	PAD		99% 92,5% 85% 100%	27.937.297.706
2	18	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	8 Dokumen	6.000.000	PAD		9 Dokumen	10.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	2.000.000	PAD		2 Dokumen	3.000.000
2	18	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	7 Laporan	4.000.000	PAD		8 Laporan	7.000.000
2	18	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	6 Laporan	23.453.003.000	PAD		6 Laporan	24.637.938.026
2	18	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	5908 Orang /Bulan	23.448.003.000	PAD		5908 Orang /Bulan	24.631.938.026
2	18	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	15 laporan	5.000.000	PAD		15 laporan	6.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	1 Laporan	50.000.000	PAD		1 Laporan	50.000.000
2	18	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	8 Orang	50.000.000	PAD		8 Orang	50.000.000
2	18	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	7 Laporan	1.160.000.000	PAD		6 Laporan	1.200.000.000
2	18	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	10.000.000	PAD		1 Paket	20.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	5 Paket	420.000.000	PAD		1 Paket	480.000.000
2	18	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	200.000.000	PAD		1 Paket	200.000.000
2	18	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	30.000.000	PAD		0 Dokumen	-
2	18	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	50.000.000	PAD		12 Laporan	50.000.000
2	18	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	400.000.000	PAD		24 Laporan	400.000.000
2	18	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	50.000.000	PAD		12 Dokumen	50.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD		2 Laporan	200.000.000
2	18	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	0 Unit	-	PAD		10 Unit	100.000.000
2	18	1	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD		10 Unit	100.000.000
2	18	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	4 Laporan	1.290.753.340	PAD		4 Laporan	1.237.699.680
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	600.000.000	PAD		12 Laporan	600.000.000
2	18	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	690.753.340	PAD		12 Laporan	637.699.680

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bekasi	4 Laporan	601.660.000	PAD		4 Laporan	601.660.000
2	18	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	2 Unit	86.660.000	PAD		2 Unit	86.660.000
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	12 Unit	240.000.000	PAD		12 Unit	240.000.000
2	18	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	75.000.000	PAD		80 Unit	75.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	1	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	200.000.000	PAD		1 Unit	200.000.000
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Kota Bekasi	4%	225.000.000	PAD		4%	600.735.000
2	18	2		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	75.000.000	PAD		100%	100.000.000
2	18	2	03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	75.000.000	PAD		1 Dokumen	100.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	2		Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	Kota Bekasi	100%	150.000.000	PAD		100%	500.735.000
2	18	2	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	150.000.000	PAD		0 Dokumen	-
2	18	2	5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	0 dokumen	-	PAD		1 Dokumen	500.735.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD		100%	368.130.000
2	18	03		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD		100%	368.130.000
2	18	03	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Dokumen	350.000.000	PAD		3 Dokumen	368.130.000
2	18	4		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Kota Bekasi	100%	4.293.000.000	PAD		100%	4.515.377.400

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	4		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	4.293.000.000	PAD		100%	4.515.377.400
2	18	4	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	218.000.000	PAD		1 dokumen	300.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	4	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	13.000 Pelaku Usaha	4.000.000.000	PAD		13.500 Pelaku Usaha	4.115.377.400
2	18	4	8	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kota Bekasi	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	PAD		250 Kegiatan Usaha	100.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	Kota Bekasi	23,5%	600.000.000	PAD		27,5%	300.000.000
2	18	05		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	Kota Bekasi	100%	600.000.000	PAD		100%	300.000.000
2	18	05	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Bekasi	300 Kegiatan Usaha	150.000.000	PAD		200 Kegiatan Usaha	100.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	05	5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	600 Pelaku Usaha	200.000.000	PAD		0 Pelaku Usaha	-
2	18	05	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Bekasi	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	PAD		250 Kegiatan Usaha	200.000.000
2	18	6		Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD		100%	519.530.598

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	6		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD		100%	519.530.598
2	18	6	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bekasi	12 Dokumen	525.319.070	PAD		12 Dokumen	519.530.598
					BLPU			26.561.416.340				27.937.297.706
					BLU			5.993.319.070				6.303.772.998
					Total Anggaran			32.554.735.410				34.241.070.704

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BEKASI

Perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, RKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026, Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dengan mengacu hal-hal tersebut di DPMPTSP Kota Bekasi telah merumuskan 6 (enam) Program, 12 (duabelas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Bekasi yaitu meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik.

Dalam mendukung arah kebijakan yang telah ditentukan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik berbasis digital. Adapun Rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Bekasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kota Bekasi	100% 92% 84% 100%	26.561.416.340	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	8 Dokumen	6.000.000	PAD	
2	18	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	2.000.000	PAD	
2	18	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	7 Laporan	4.000.000	PAD	
2	18	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	6 Laporan	23.453.003.000	PAD	
2	18	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	6.020 Orang /Bulan	23.448.003.000	PAD	
2	18	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	15 laporan	5.000.000	PAD	
2	18	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	1 Laporan	50.000.000	PAD	
2	18	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	8 Orang	50.000.000	PAD	
2	18	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	7 Laporan	1.160.000.000	PAD	
2	18	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Kota Bekasi	1 Paket	10.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan					
2	18	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	5 Paket	420.000.000	PAD	
2	18	1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	200.000.000	PAD	
2	18	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	30.000.000	PAD	
2	18	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	50.000.000	PAD	
2	18	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	400.000.000	PAD	
2	18	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	50.000.000	PAD	
2	18	1		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD	
2	18	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	0 Unit	-	PAD	
2	18	1	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD	
2	18	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	4 Laporan	1.290.753.340	PAD	
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	600.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	690.753.340	PAD	
2	18	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bekasi	4 Laporan	601.660.000	PAD	
2	18	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	2 Unit	86.660.000	PAD	
2	18	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	12 Unit	240.000.000	PAD	
2	18	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	75.000.000	PAD	
2	18	1	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	200.000.000	PAD	
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Kota Bekasi	4%	225.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	2		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	75.000.000	PAD	
2	18	2	03	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	75.000.000	PAD	
2	18	2		Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	Kota Bekasi	100%	150.000.000	PAD	
2	18	2	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	150.000.000	PAD	
2	18	2	5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	0 dokumen	-	PAD	
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD	
2	18	03		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	350.000.000	PAD	
2	18	03	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Dokumen	350.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	4		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Kota Bekasi	100%	4.293.000.000	PAD	
2	18	4		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	4.293.000.000	PAD	
2	18	4	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	1 dokumen	218.000.000	PAD	
2	18	4	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bekasi	13.000 Pelaku Usaha	4.000.000.000	PAD	
2	18	4	8	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kota Bekasi	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	PAD	
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	Kota Bekasi	23,5%	600.000.000	PAD	
2	18	05		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	Kota Bekasi	100%	600.000.000	PAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	05	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Bekasi	300 Kegiatan Usaha	150.000.000	PAD	
2	18	05	5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bekasi	600 Pelaku Usaha	200.000.000	PAD	
2	18	05	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kota Bekasi	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	PAD	
2	18	6		Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD	
2	18	6		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan	Kota Bekasi	100%	525.319.070	PAD	
2	18	6	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bekasi	12 Dokumen	525.319.070	PAD	
					BLPU			26.561.416.340		
					BLU			5.993.319.070		
					Total Anggaran			32.554.735.410		

B A B V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 ini, dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2026 setelah adanya anggaran kegiatan. Renja DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP sangat terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kota Bekasi disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang dan Renstra DPMPTSP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Bekasi.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini :

1. Sinkronisasi dan Konsistensi untuk seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2026 selaras dengan arah kebijakan RPJMD, Renstra DPMPTSP, dan RKPD Kota Bekasi, serta berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama pada DPMPTSP;
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui pembenahan sistem manajemen internal, penguatan SOP, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan secara berjenjang;
3. Mengembangkan kompetensi ASN DPMPTSP melalui pelatihan teknis, pembinaan, dan penguatan nilai-nilai pelayanan publik, agar mampu melaksanakan tugas secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan secara berkala, guna menilai efektivitas pelaksanaan program serta merumuskan langkah korektif terhadap kendala yang dihadapi;
5. Menjalin sinergi dengan sektor swasta, asosiasi pelaku usaha, perangkat daerah teknis, serta masyarakat, guna menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan pelayanan yang terintegrasi;
6. Melaksanakan kegiatan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjunjung tinggi akuntabilitas anggaran, serta membuka akses informasi bagi publik terhadap proses dan capaian kinerja;
7. Renja DPMPTSP Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan semangat bersama dapat merealisasikannya demi mencapai tujuan akhir yaitu Peningkatan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Program dan Kegiatan DPMPTSP serta menjadikan Kota Bekasi sebagai kota tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.

Bekasi, 15 Agustus 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi



Dr. Dicky Irawan, S.T M.T
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720413 199901 1002